

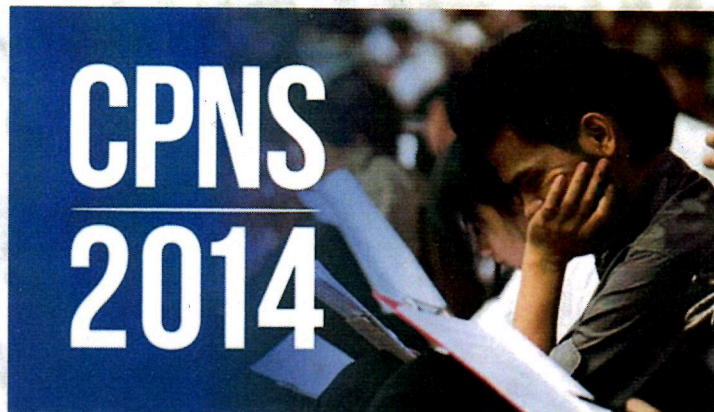
**BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



L A K I P

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2014



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia, sehingga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 ini dapat disusun sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dengan menyampaikan sasaran strategis dan indikator utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau dengan melakukan pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja. Laporan ini juga merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggung jawaban kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang kepegawaian.

Semoga penyajian LAKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar pengukuran kinerja kedepan lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, Februari 2015

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU**
ditanda tangani oleh:
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



MUHAMAD GUNTUR

Pembina Tingkat I

Nip. 19730806 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Keadaan Pegawai	4
E. Kondisi Sarana dan Prasarana	7
F. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	11
A. Perencanaan Strategis	11
B. Rencana Kerja Tahunan	17
C. Perencanaan Kinerja	21
D. Indikator Kinerja Utama	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Pengukuran Capaian Kinerja	33
B. Alokasi dan Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP	38
Saran dan Rekomendasi	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Gambar Struktur Organisasi	3
Tabel 1.2. Jumlah PNS BKP2D Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin.....	4
Tabel 1.3. Jumlah PNS BKP2D Provinsi Riau Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	4
Tabel 1.4. Jumlah Pejabat BKP2D Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.5. Sumber Daya BKP2D Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.6. Sarana dan Prasarana BKP2D Provinsi Riau	7
Tabel 2.1. Tujuan Sasaran dan Indikator BKP2D Provinsi Riau.....	13
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BKP2D Provinsi Riau.....	23
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama BKP2D Provinsi Riau	31
Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja BKP2D Provinsi Riau	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau merupakan bagian dari organisasi pemerintahan yang mempunyai peran sebagai pembina dan pengembang sumber daya aparatur daerah Riau. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian serta ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang dan tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara Negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan serta manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang profesional serta mampu memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan perencanaan dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan dinamis. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dan mensukseskan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat obyektif dan wajar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2014 memuat hasil pencapaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan permasalahan yang dihadapi beserta solusi maupun alternatif pemecahan masalah

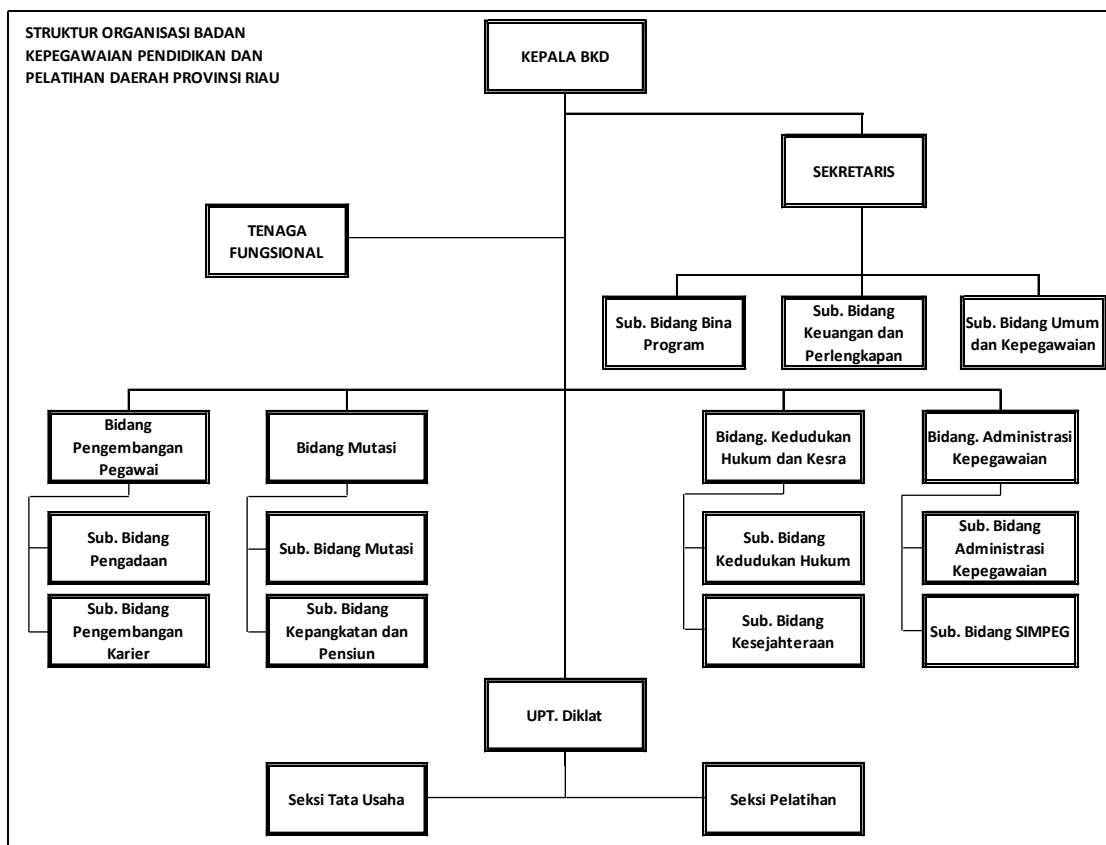
tersebut. Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai data guna peningkatan kinerja Badan kepegawaian dimasa yang akan datang.

B. Gambaran Umum

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, serta peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2009 tentang uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau. Berdasarkan Perda dan Pergub diatas susunan struktur organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris :
 - a. Subbagian Perencanaan Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengembangan Pegawai :
 - a. Subbidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai;
 - b. Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis.
4. Bidang Mutasi :
 - a. Subbidang Mutasi Jabatan dan Non Jabatan;
 - b. Subbidang Kepangkatan Jabatan dan Non Jabatan.
5. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai :
 - a. Subbidang Kedudukan Hukum;
 - b. Subbidang Kesejahteraan Pegawai.
6. Bidang Administrasi Kepegawaian :
 - a. Subbidang Informasi Kepegawaian;
 - b. Subbidang Pengadaan, Pensiun PNS dan Tata Usaha Kepegawaian.

Tabel 1.1. Gambar Struktur Organisasi



C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau menjelaskan bahwa BKP2D Provinsi Riau mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian daerah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, BKP2D Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian;

- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2014 sebanyak 157 orang dengan data sebagai berikut :

**Tabel 1.2. Jumlah PNS BKP2D Provinsi Riau Tahun 2014
Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
104	53	157

Dari jumlah tersebut maka dapat terlihat bahwasanya 66 % pegawai BKP2D Provinsi Riau berjenis kelamin laki-laki. Dari jumlah tersebut maka ditampilkan data berdasarkan golongan sebagai berikut :

**Tabel 1.3. Jumlah PNS BKP2D Provinsi Riau Tahun 2014
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

Ket	Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Per Jenis Kelamin	5	1	42	13	40	35	17	4
Sub.Total	6		55		75		21	
Total	157							

Berdasarkan data tersebut diatas terdapat 75 orang yang merupakan Golongan III dari 157 orang Pegawai BKP2D Provinsi Riau, dan terdapat Golongan I berjumlah 6 orang. Jumlah pejabat BKP2D berdasarkan jabatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.4. Jumlah Pejabat BKP2D Provinsi Riau Tahun 2014
Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin**

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Eselon II	1		1
Eselon III	5	1	6
Eselon IV	6	7	13
Widyaiswara	13	2	15
Asiparis	1		1
Jumlah	26	10	36

Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel Sumber Daya BKP2D Provinsi Riau dibawah ini :

**Tabel 1.5. Sumber Daya BKP2D Provinsi Riau Tahun 2014
Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	JABATAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Kepala Dinas	1		1
2	Sekretaris	1		1
3	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	1		1
4	Kepala Bidang Bidang Mutasi		1	1
5	Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesra	1		1
6	Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian	1		1

7	Kepala UPT Balai Diklat Pegawai	1		1
8	Kepala Subbag Perencanaan Program	1		1
9	Kepala Subbag Keuangan dan Perlengkapan		1	1
10	Kepala Subbag Umum	1		1
11	Kepala Subbidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai		1	1
12	Kepala Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis	1		1
13	Kepala Subbid Mutasi Jabatan dan Non Jabatan		1	1
14	Kepala Subbid Kepangkatan Jabatan dan Non Jabatan	1		1
15	Kepala Subbid Kedudukan Hukum		1	1
16	Kepala Subbid Kesejahteraan Pegawai		1	1
17	Kepala Subbid Informasi Pegawai		1	1
18	Kepala Subbidang Pengadaan, Pensiun PNS dan Tata Usaha Kepegawaian		1	1
19	Kepala Seksi Tata Usaha UPT Balai Diklat	1		1
20	Kepala Seksi Pelatihan UPT Balai Diklat	1		1
21	Jabatan Fungsional			
	Widyaiswara	13	2	15

	Arsiparis	1		1
22	Pelaksana	78	43	121
TOTAL		104	53	157

E. Kondisi Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusianya saja. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga tercapai kualitas kerja yang baik. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai.

Umumnya sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk menunjang kegiatan ketata-usahaan/administrasi kantor dan peningkatan kualitas kinerja Sumber Daya Aparatur serta penunjang pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6. Sarana dan Prasarana BKP2D Provinsi Riau Tahun 2014

A. Tanah dan Bangunan				
1	Luas tanah gedung kantor BKP2D	:	3.212	M ²
2	Luas tanah kantor UPT Diklat jalan Ronggo Warsito	:	13.880	M ²
3	Luas tanah UPT Diklat Pasir Putih	:	149.410	M ²
B. Alat-Alat Angkutan				
1	Kendaraan bermotor:			
	- Roda empat	:	8	unit
	- Roda dua	:	3	unit
2	Mesin ketik manual standar	:	2	unit
3	Mesin ketik elektronik	:	1	unit
4	Mesin fotocopy dengan kertas folio	:	2	unit
5	Lemari besi	:	1	unit
6	Rak besi/metal	:	5	unit
7	Rak kayu	:	6	unit
8	Filling besi/metal	:	4	unit
9	Rotary filling	:	1	unit
10	Lemari kayu	:	9	unit

11	Papan pengumuman	:	1	unit
12	White board	:	2	unit
13	Alat pemotong kertas	:	1	unit
14	Alat kantor lainnya	:	7	unit
15	Lemari kayu	:	3	unit
16	Meja kayu/rotan	:	13	unit
17	Tempat tidur besi/metal (lengkap)	:	1	unit
18	Tempat tidur kayu (lengkap)	:	200	unit
19	Meja rapat	:	36	unit
20	Meja makan	:	10	unit
21	Meja panjang	:	1	unit
22	Kursi rapat	:	157	unit
23	Kursi tamu	:	1	unit
24	Kursi tangan	:	1	unit
25	Kursi putar	:	3	unit
26	Kursi biasa	:	1	unit
27	Bangku tunggu	:	1	unit
28	Meja Komputer	:	51	unit
29	Kasur	:	100	unit
30	Bantal	:	100	unit
31	Sprei	:	100	unit
32	Sofa	:	7	unit
33	Lemari Pakaian	:	16	Unit
34	Mesin penghisap debu	:	2	unit
35	Lemari es	:	1	unit
36	AC unit	:	54	unit
37	AC split	:	9	unit
38	Kipas angin	:	100	unit
39	Sound System	:	1	unit
40	Wireless	:	1	unit
41	Unit Power Supply	:	59	unit
42	Stabilisator	:	2	unit
43	Camera Video	:	1	unit
44	Dispenser	:	17	unit
45	Alat rumah tangga lain-lain	:	202	unit
46	Gorden	:	2	unit
47	Alat pemadam portable	:	2	unit
48	PC unit	:	151	unit
49	Laptop	:	7	unit
50	Note book	:	37	unit
51	Hard disk	:	1	unit
52	Scanner	:	5	unit
53	Monitor	:	50	unit
54	Printer	:	91	unit
55	Server	:	2	unit
56	Peralatan personal komputer lain-lain	:	11	unit
57	Peralatan Jaringan Lain-lain	:	2	unit
58	Meja kerja pegawai non struktural	:	1	unit
59	Meja kerja pejabat lain-lain	:	11	unit
60	Meja Rapat Pejabat eselon II	:	1	Unit

61	Meja rapat pejabat eselon III	:	3	unit
62	Meja rapat pejabat lain-lain	:	5	unit
63	Kursi kerja pejabat eselon II	:	1	unit
64	Kursi kerja pejabat eselon III	:	3	unit
65	Kursi kerja pegawai non struktural	:	100	unit
66	Kursi kerja pejabat lain-lain	:	22	unit
67	Kursi rapat pejabat eselon III	:	1	unit
68	Kursi tamu diruangan pejabat lain-lain	:	50	unit
C.	Alat Studio dan Alat Komunikasi			
1	Camera + attachment	:	2	unit
2	Proyektor + attachment	:	17	unit
3	Microphone/wireless mic	:	12	unit
4	Unit Power Supply (UPS)	:	1	unit
5	Peralatan studio visual lain-lain	:	5	unit
6	Breket LCD/TV	:	13	unit
7	Handy cam	:	3	unit
8	Infocus	:	3	unit
9	Peralatan studio video dan film lain-lain	:	2	unit
10	Camera electronic	:	3	unit
11	Video monitor	:	1	unit
12	Tripod camera	:	2	unit
13	Layar film	:	1	unit
14	Sound system	:	4	unit
15	Telephone (PABX)	:	1	unit
16	Pesawat telephone	:	20	unit
17	Alat komunikasi lain-lain	:	27	unit
18	Wireless amplifier	:	1	unit
D.	Alat Laboratorium			
1	Personal komputer	:	2	unit
2	Alat laboratorium lainnya	:	20	unit
3	Alat laboratorium penunjang lainnya	:	8	unit
4	Software cont off-line computer	:	2	unit
5	Alat Keamana Lain-lain	:	1	unit
E.	Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	:	6	unit
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	:	2	unit
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	:	4	unit
4	Bangunan Gudang Lain-lain	:	3	unit
5	Gedung Pos jaga Permanen	:	1	unit
6	Bangunan Menara/pagar	:	1	unit
7	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	:	2	unit
8	Asrama Permanen	:	5	unit
9	Bangunan Pengambilan Air Bersih dan lain-lain	:	1	unit
10	Bangunan Penampung Air Baku	:	1	unit
11	Bangunan Pembuangan air kotor lain-lain	:	1	unit
F.	Lain-lain			
1	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas sedang	:	2	unit
2	Instalasi Gardu Listrik Induk lain-lain	:	1	unit

3	Instalasi Gardu Listrik distribusi lain-lain	:	2	unit
4	Jaringan LAN/WAN/Internet	:	10	unit
5	Buku Umum lain-lain	:	1	buah
6	Lukisan lain-lain	:	1	buah
7	Alat Voley	:	12	buah
8	Alat Tenis Meja	:	5	buah
9	Alat Badminton	:	13	buah
10	Alat Olahraga lain-lain	:	4	buah
11	Kontruksi dalam Pengerjaan	:	1	unit

F. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menjelaskan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau selama Tahun 2014. Pencapaian ini didasari pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja tahunan akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 adalah :

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini menguraikan latar belakang, gambaran umum, tugas dan fungsi, keadaan pegawai dan kondisi sarana prasarana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini memuat perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Dalam Bab ini diuraikan pengukuran capaian kinerja dan alokasi realisasi anggaran.

Bab IV : Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat akan membuat perencanaan menjadi tepat sasaran, efektif dapat diterima oleh pihak-pihak terkait dan dapat dipertanggung jawabkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan isu-isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu-isu strategis ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan pembangunan. RPJMD Riau Periode 2014-2019 memuat visi, misi, strategi dan kebijakan dasar pembangunan yang telah ditetapkan. Visi dan misi memiliki kedudukan penting dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu perumusan visi dan misi perlu dilakukan secara seksama dengan melibatkan berbagai stakeholders yang terkait dengan tupoksi. Secara konseptual, Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Sebagai sebuah tujuan, visi bukan sekedar harapan maupun mimpi. Visi merupakan tujuan yang dapat diperkirakan kapan dapat dicapai. Selain itu juga bagaimana cara mencapainya.

Gambaran Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019 sebagai berikut :

1. Visi Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah: ***“Terwujudnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai pusat pembangunan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara untuk mewujudkan reformasi birokrasi menuju visi Riau 2025”***

Makna yang terkandung dalam visi:

- a. ***Pusat pembangunan*** adalah pusat pembangunan aparatur sipil negara yang berlandaskan pada prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN;
- b. ***Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara*** adalah pusat penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur Sipil negara yang berdasarkan azas ASN;

- c. ***Mewujudkan Reformasi Birokrasi*** adalah melakukan perubahan dan pembaharuan yang mendasar secara bertahap dan berkelanjutan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi birokrasi yang bersih dan melayani.

2. Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah :

Rumusan misi ditetapkan berdasarkan visi dengan memperhatikan lingkungan strategis baik, internal maupun eksternal. Aspek internal menyangkut kekuatan dan kelemahan. Sedangkan aspek eksternal menyangkut peluang dan ancaman. Berdasarkan rumusan visi dan telaah lingkungan strategis, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau menetapkan misi 2014-2019 sebagai berikut:

- 1) Membangun aparatur sipil negara pemerintah provinsi Riau yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN melalui pengelolaan manajemen aparatur sipil negara yang berlandaskan azas ASN;
- 2) Menyelenggarakan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang sesuai dengan azas ASN.

Makna yang terkandung dalam misi tersebut adalah:

- a. **Membangun aparatur sipil Negara pemerintah provinsi Riau yang berlandaskan prinsip, nilai dasar, dan kode etik ASN melalui pengelolaan manajemen apartur sipil negara yang berlandaskan azas ASN** adalah membangun aparatur sipil negara sebagai profesi yang didasari atas nilai dasar, kode etik, kode perilaku, komitmen, integritas moral dan bertanggung jawab pada pelayanan publik berdasarkan kualifikasi akademik serta kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas melalui penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara yang berlandaskan azas ASN;
- b. **Menyelenggarakan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang sesuai dengan azas ASN** adalah melakukan pelaksanaan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan kepastian hukum, profesionalitas, proposionalitas, keterpaduan, delegasi, netralisasi, akuntabilitas, efektif, efisien keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan.

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau menjabarkan tujuan dan

sasaran strategis yang ingin dicapai secara tahunan selama periode Renstra tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator BKP2D Tahun 2014

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya aparatur sipil negara yang memiliki prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN melalui manajemen ASN yang berlandaskan azas ASN	1.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)	1.1.1. Presentase aparatur sipil negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi
		1.2. Peningkatan disiplin aparatur negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik	1.2.1. Presentase menurunnya Aparatur Sipil Negara dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi
		1.3. Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	1.3.1. Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan
		1.4. Meningkatkan kualitas pendidikan PNS melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	1.4.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan
		1.5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	1.5.1. Presentase aparatur sipil negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraannya
2.	Terwujudnya penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan azas ASN melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi	2.1. Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi	2.1.1. Presentase penyelesaian pelayanan administrasi aparatur sipil negara
		2.2. Peningkatan sarana dan prasarana kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima agar efisien dan efektif	2.2.1. Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi untuk meningkatkan pelayanan manajemen aparatur sipil Negara

4. Strategi

- 1) Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan, dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran yang bersertifikasi;
- 2) Peningkatan kualitas aparatur sipil negara yang bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku aparatur sipil negara;
- 3) Penyelenggaraan sosialisasi, seminar dan penataran tentang peraturan terkait dengan kebijakan aparatur sipil negara;
- 4) Peningkatan fasilitas tugas belajar dan memberikan kemudahan bagi PNS yang akan meningkatkan pengetahuan dan keahliannya melalui tugas belajar mandiri, ijin belajar, beasiswa serta peningkatan dalam pelatihan kepemimpinan dengan menerapkan konsep pelatihan kepemimpinan pola baru;
- 5) Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui :
 - a. Tambahan penghasilan aparatur sipil negara yang meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan berdasarkan penilaian pencapaian kinerja dan indeks harga yang berlaku;
 - b. Memberikan fasilitas kepada PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
 - d. Memberikan perlindungan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum bagi aparatur sipil Negara.
- 6) Menerapkan *merit system* dalam pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi;
- 7) Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima serta pengembangan pusat *assesment center* dan pembangunan pusat pendidikan pelatihan berbasis teknologi yang terakreditasi.

5. Kebijakan

Kebijakan yang disusun oleh Badan Kepegawaian Pendidikandan Pelatihan Provinsi Riau untuk mendukung terlaksananya misi serta strategi yang ada adalah sebagai berikut:

Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier Aparatur Sipil Negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan, dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran yang bersertifikasi.

Kebijakan :

- a. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan bersertifikasi didasarkan prioritas dan hasil analisis kebutuhan pelatihan yang menunjang perkembangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
- b. Pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga pengajar/widyaiswara bersertifikasi;
- c. Pengembangan dan peningkatan kualitas asesor melalui kerja praktek dan pelatihan untuk menghasilkan asesor yang bersertifikasi dengan standarisasi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP).

Peningkatan kualitas aparatur sipil negara yang bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku aparatur sipil negara.

Kebijakan :

- a. Penegakan peraturan disiplin aparatur sipil negara, kode etik dan perilaku aparatur sipil negara dan kode etik profesi;
- b. Penerapan penyampaian tentang laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHK-ASN) bagi seluruh aparatur sipil negara;
- c. Pemberian penghargaan terhadap aparatur sipil negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya;
- d. Penerapan sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara yang didasarkan sistem prestasi dan karier yang dilakukan oleh tim penilai kinerja aparatur sipil Negara.

Penyelenggaraan sosialisasi, seminar dan penataran tentang peraturan terkait dengan kebijakan aparatur sipil negara.

Kebijakan:

Peningkatan wawasan aparatur sipil negara melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan Aparatur Sipil Negara dalam sistem pemerintahan.

Peningkatan fasilitas tugas belajar dan memberikan kemudahan bagi PNS yang akan meningkatkan pengetahuan dan keahliannya melalui tugas belajar mandiri, ijin belajar serta peningkatan dalam pelatihan kepemimpinan dengan menerapkan konsep pelatihan kepemimpinan pola baru.

Kebijakan :

Pemberian kemudahan peningkatan pendidikan pelatihan, bagi PNS yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan melalui tugas belajar mandiri, beasiswa dan penerapan pola pendidikan baru bagi pelatihan kepemimpinan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi.

Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara

Kebijakan :

- a. Pemberian penambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara berupa tunjangan meliputi tunjangan kinerja dibayarkan dengan penilaian kinerja dan tunjangan kemahalan dibayarkan dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku;
- b. Pemberian fasilitas kepada PNS dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku;
- d. Pemberian perlindungan bagi aparatur sipil negara berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan bantuan hukum.

Menerapkan *merit system* dalam pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi.

Kebijakan :

- a. Penerapan proses pengadaan aparatur sipil negara secara terbuka, transparan, dan objektivitas melalui kompetensi, kualifikasi untuk mendapatkan aparatur sipil negara yang berkualitas;
- b. Penyusunan dan penetapan kebutuhan melalui penataan aparatur Sipil Negara yang ideal sesuai kebutuhan dan kompetensi (*right sizzing*) dengan pemetaan (*Mapping*);
- c. Penerapan penyusunan pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional;
- d. Penerapan *merit system* untuk mutasi dan promosi PNS;
- e. Penerapan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis *E-Kepegawaian*;

- f. Penerapan, evaluasi dan pembaharuan standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan manajemen aparatur sipil negara untuk meningkatkan mutu pelayanan manajemen aparatur sipil negara;
- g. Penyelenggaraan survey indeks kepuasan pelayanan manajemen aparatur sipil Negara.

Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima serta pengembangan Pusat *assesment center* dan pembangunan pusat pendidikan pelatihan berbasis teknologi yang terakreditasi.

Kebijakan :

- a. Peningkatan prasarana dan sarana kantor untuk pelayanan manajemen apartur sipil negara melalui sistem informasi berbasis *E-Government* perkantoran modern dengan sistem, informasi teknologi secara elektronik;
- b. Membangun UPT *Aessment* untuk pengembangan dan pelaksanaan *asesmnet center* provinsi Riau dengan fasilitas dan sarana yang sesuai standar dan terakreditasi untuk pelaksanaan *asesment*;
- c. Menjadikan UPT Pendidikan dan Pelatihan menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan fasilitas prasarana dan media pembelajaran yang sesuai dengan standar diklat terakreditasi berbasis modern dengan sistem informasi dan teknologi.

B. Rencana Kerja Tahunan

Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, pelayanan yang diberikan oleh BKP2D Provinsi Riau adalah pelayanan berupa urusan kepegawaian kepada aparatur pemerintah. Pada Tahun 2014 terdapat 8 (delapan) program dengan 99 kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

(14 Kegiatan)

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional;
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;

- 5) Penyediaan alat tulis kantor;
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 10) Penyediaan makan dan minum;
- 11) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 12) Penyediaan jasa keamanan kantor;
- 13) Pameran pembangunan provinsi Riau (Riau Expo);
- 14) Rapat Koordinasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan se-Provinsi Riau.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(4 kegiatan)

- 1) Pengadaan peralatan gedung kantor;
- 2) Pengadaan mebeluer;
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

(5 kegiatan)

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
- 2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
- 3) Pelaksanaan sumpah/janji PNS;
- 4) Pemantauan disiplin PNS;
- 5) Sosialisasi PERKALAN NO 10, 11, 12 DAN 13 TAHUN 2014 tentang Diklat Kepemimpinan Tk.III dan IV pola Baru.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(13 Kegiatan)

- 1) Pembinaan fisik dan mental aparatur;
- 2) Pendidikan, pelatihan, kursus dan bimbingan teknis pegawai BKP2D;
- 3) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat I (DIKLATPIM I);
- 4) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II (DIKLATPIM II);
- 5) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III (DIKLATPIM III);
- 6) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV (DIKLATPIM IV);
- 7) Diklat prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan III;
- 8) Diklat prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan II.

- 9) Diklat fungsional pegawai pemerintah provinsi Riau;
- 10) *Assessment Center* provinsi Riau;
- 11) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2011;
- 12) Sosialisasi peraturan pengelolaan kepangkatan dan pensiun kepegawaian bagi PNS provinsi Riau
- 13) Bimbingan teknis peraturan perkawinan dan UU tentang penghapusan kekerasan rumah tangga

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(8 Kegiatan)**

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
- 3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
- 4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- 5) Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD;
- 6) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- 7) Penyusunan Perjanjian Kinerja (Penja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 8) Pelaporan barang milik daerah;

**6. Program Fasilitas Pindah Purna Tugas PNS
(4 kegiatan)**

- 1) Pengelolaan administrasi pindah tugas Aparatur Sipil Negara;
- 2) Pengelolaan pensiun Aparatur Sipil Negara;
- 3) Orientasi Aparatur Sipil Negara purna bakti;
- 4) Pelatihan berwiraswasta kepada Aparatur Sipil Negara memasuki masa pensiun;

**7. Program Pendidikan Kedinasan Aparatur Sipil Negara
(7 kegiatan)**

- 1) Diklat teknis pegawai pemerintah provinsi Riau;
- 2) Monitoring IPDN;
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat;
- 4) Diklat kompetensi dan pengembangan widyaiswara;
- 5) Diklat *Training of Trainers* (TOT) widyaiswara;

- 6) Diklat *Training of Fasilitator* (TOF);
- 7) Diklat substansi materi penguasaan diri;

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

(44 kegiatan)

- 1) Pengelolaan data kepegawaian
- 2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
- 3) Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (*e-document*);
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 5) Pengelolaan *website* badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- 6) Pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- 7) Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik;
- 8) Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan SIMPEG di pemerintah provinsi Riau dan Kab/Kota se provinsi Riau;
- 9) Pengadaan calon PNS;
- 10) Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
- 11) Penyusunan formasi PNS provinsi Riau;
- 12) Penataan pegawai negeri sipil pemerintahan Provinsi Riau berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- 13) Bimtek pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- 14) Bimtek penyusunan formasi pengadaan PNS provinsi Riau;
- 15) Seleksi penerimaan IPDN;
- 16) Pemberian beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas;
- 17) Diklat analisis kebutuhan diklat;
- 18) Diklat analisis jabatan dan beban Kerja;
- 19) Pelaksanaan Grand Design SDM Aparatur;
- 20) Pengelolaan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
- 21) Monitoring, evaluasi, dan orientasi pelaksanaan administrasi pengangkatan pejabat struktural eselon II;
- 22) Rapat-rapat tim baperjakat daerah provinsi Riau;
- 23) Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan struktural di lingkungan pemerintah provinsi Riau;
- 24) Pengelolaan administrasi pengangkatan jabatan Sekretaris Daerah dan jabatan struktural eselon II di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota

- se Provinsi Riau;
- 25) Pengelolaan kenaikan pangkat PNS di lingkungan pemerintah provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
 - 26) Pengelolaan penetapan angka kredit jabatan fungsional widyaiswara provinsi Riau;
 - 27) Penyusunan SOP dan SPP Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - 28) Bimtek perencanaan penganggaran BKP2D Responsif Gender;
 - 29) Penangan kasus-kasus kepegawaian;
 - 30) Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spritual Quotient Tarining;
 - 31) Satya Lencana Karya Satya;
 - 32) Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi kerja baik;
 - 33) Monitoring dan evaluasi Tapetarum dan Taspen aparatur sipil negara se-provinsi Riau.
 - 34) Diklat teknis komputer;
 - 35) Diklat teknis penilaian aset milik negara/daerah;
 - 36) Diklat teknis bahasa inggris;
 - 37) Diklat teknis administrasi kearsipan;
 - 38) Diklat teknis penyusunan tata naskah dinas;
 - 39) Diklat teknis adminitrasi kepegawaian;
 - 40) Diklat teknis penyusunan standar operasional;
 - 41) Monitoring evaluasi program dan kegiatan;
 - 42) Pengadaan E-Goverment manajemen kepegawaian provinsi Riau;
 - 43) Rakor widiyaiswara;
 - 44) Pengelolaan humas BKP2D.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Peknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan

kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BKP2D Provinsi Riau Tahun 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	1.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)	1.1.1. Presentase aparatur sipil negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi		437 Orang	2.858.801.550
			1 Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	16 Orang	202.060.000
			2 Diklat Analisis kebutuhan diklat	60 Orang	174.316.550
			3 Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja	40 Orang	192.605.000
			4 Diklat Teknis Komputer	20 Orang	75.407.000
			5 Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah	30 Orang	61.035.000
			6 Diklat Teknis Bahasa Inggris (Toefl)	20 Orang	83.410.000
			7 Diklat Teknis Administrasi Kearsipan	30 Orang	67.335.000
			8 Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian	30 Orang	71.535.000
			9 Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	30 Orang	52.935.000
			10 Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	30 Orang	67.335.000
			11 Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara	30 Orang	450.000.000
			12 Diklat TOT Widyaiswara	15 Orang	238.739.000
			13 Diklat Substansi Bagi Widyaiswara Pola Baru (TOF)	30 Orang	201.667.000

			14	Diklat Substansi Materi Penguasaan Diri	30	Orang	201.667.000
			15	Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	16	Orang	202.660.000
			16	Assesment Center Provinsi Riau	10	Orang	516.095.000
	1.2. Peningkatan disiplin aparatur negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik	1.2.1. Presentase menurunnya Aparatur Sipil Negara dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi				Orang	2.024.058.700
			1	Pemantauan disiplin PNS	83	Orang	348.840.000
			2	Penanganan kasus-kasus kepegawaian	83	Orang	200.755.000
			3	Pelaksanaan sumpah / janji PNS	150	Orang	64.920.000
			4	Pembinaan fisik dan mental aparatur	168	Orang	124.076.000
			5	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi kerja baik	36	Orang	868.442.300
			6	Satya Lencana Karya Satya	325	Orang	417.025.400
	1.3. Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	1.3.1 Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan			490	Orang	1.570.629.850
			1	Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	40	Orang	152.600.750
			2	Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau	70	Orang	192.178.600
			3	Bimtek Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	25	Orang	136.251.800

			4 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan BinteK Pegawai BKD	30	Orang	392.000.000
			5 Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun Kepegawaian Bagi PNS Provinsi Riau	40	Orang	121.796.800
			6 Bimtek peraturan perkawinan dan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga	85	Orang	198.445.000
			7 Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training	100	Orang	177.356.900
			8 Sosialisasi Perkalen No.10, 11, 12, dan 13 Tahun 2013 tentang Diklat Kepemimpinan Tk.III dan IV pola baru	100	Orang	200.000.000
	1.4. Meningkatkan kualitas pendidikan PNS melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	1.4.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan		225	orang	5.274.287.250
			1 Pemberian beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas	28	Orang	3.154.621.000
			2 Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM I)	1	Orang	53.702.250
			3 Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM II)	6	Orang	292.961.000
			4 Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM III)	40	Orang	709.437.000
			5 Pendidikan dan pelatihan struktual bagi PNS Daerah (PIM IV)	30	Orang	590.938.000
			7 Diklat prajabatan CPNS daerah Gol. III	40	Orang	204.648.000
			8 Diklat prajabatan CPNS daerah Gol. II	80	Orang	267.980.000

	1.5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	1.5.1. Presentase aparatur sipil negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkatkan kesejahteraannya		1.078	Orang	1.189.431.575	
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	218	Orang	114.602.500
			2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	217	Orang	107.702.500
			3	Pengelolaan pensiun PNS	318	Orang	153.401.175
			4	Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti	250	Orang	707.425.300
			5	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun	75	Orang	106.300.100
2.	2.1. Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi	2.1.1. Presentase penyelesaian pelayanan adminitrasi aparatur sipil negara				5.858.311.500	
			1	Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	10	SKPD	489.553.600
			2	Pelaksanaan Grand Design SDM Aparatur	1	Dokumen	250.000.000
			3	Seleksi Penerimaan CPNS	1	Tahun	943.810.750
			4	Seleksi Penerimaan IPDN	100	Orang	249.817.250
			5	Assesment Center Provinsi Riau	80	Orang	-
			6	Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	75	Orang	254.760.000
			7	Pengelolaan Humas BKD	12	Bulan	200.000.000
			8	Rapat-rapat tim Baperjakat Provinsi Riau	60	Kali	123.441.250

			9	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural/Fungsional di lingkungan Pemda Provinsi Riau	1	Dokumen	151.425.750
			10	Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau	12	Kabupaten/ Kota	258.708.000
			11	Pengelolaan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	3.000	SK	464.448.000
			12	Pengelolaan penetapan angka kredit jabatan fungsional widiyaiswara Provinsi Riau	10	Orang/dupa k/pak wi	130.445.000
			13	Pengelolaan pengangkatan CPNS menjadi PNS	30	Orang	83.700.000
			14	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	95.524.700
			15	Pengelolaan Daftar Urut Kependidikan (DUK)	1	Dokumen	102.950.100
			16	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	1	Dokumen	326.400.000
			17	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	1	Dokumen	89.041.700
			18	Pengelolaan data kepegawaian	4	Dokumen	165.483.800
			19	Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	500	PNS	176.222.000
			20	Pengadaan e-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	6	Aplikasi	700.000.000
			21	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	39	SKPD	252.202.750
			22	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik (e-document)	1	Aplikasi	107.476.850
			23	Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah	12	Bulan	92.900.000

			24	Penyusunan SOP dan SPP Badan Kepegawaian dan Diklat	15	SOP	150.000.000
	2.2. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.2.1. Presentase sistem laporan capaian dan keuangan yang meningkat			20	Dokumen	2.826.133.575
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen	88.000.000
			2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1	Dokumen	50.000.000
			3	Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran	1	Dokumen	50.000.000
			4	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen	50.000.000
			5	Penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD	1	Dokumen	170.087.750
			6	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	1	Dokumen	134.895.750
			7	Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	3	Dokumen	93.852.350
			8	Pelaporan barang milik daerah	1	Dokumen	47.055.675
			9	Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan	1	Dokumen	153.214.000
			10	Monitoring IPDN	1	Dokumen	100.000.000
			11	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat	1	Dokumen	75.000.000
			12	Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II	1	Dokumen	179.938.500
			13	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	1	Dokumen	208.126.500

			14	Monitoring dan Evaluasi Tapetarium dan taspen PNS se Provinsi Riau	1	Dokumen	149.924.800
			15	Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	1	Dokumen	157.494.250
			16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	Tahun	767.550.000
			17	Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau	1	Dokumen	150.000.000
			18	Rakor Widya Iswara	1	Dokumen	200.994.000
	2.3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima agar efisien dan efektif	2.3.1. Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi untuk meningkatkan pelayanan manajemen aparatur sipil Negara					9.382.230.300
			1	Pengadaan peralatan gedung kantor	106	Unit	1.061.284.600
			2	Pengadaan Mebeluer	1.033	Unit	1.550.000.000
			3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10	Unit	40.926.000
			4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	983	Unit	169.111.000
			5	Penyediaan jasa surat menyurat	3.700	Surat	43.525.000
			6	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	Tahun	917.500.000
			7	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	17	Unit	374.579.100
			8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22	Orang	942.872.900
			9	Penyediaan alat tulis kantor	1	Tahun	198.084.125

			10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	Tahun	199.545.675
			11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	859	Unit	75.000.000
			12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	319	Unit	2.615.747.000
			13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	105 1.488	Buku Ex Majalah	189.200.000
			14	Penyediaan makanan dan minuman	12.428	Orang	191.600.000
			15	Penyediaan jasa keamanan kantor	14	Orang	610.286.900
			16	Pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau expo)	1.000	Orang	202.968.000

D. Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD.

**Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2014
BKP2D Provinsi Riau**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	1.1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)	1.1.1. Presentase aparatur sipil negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi	7%
	1.2. Peningkatan disiplin aparatur negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik	1.1.2. Presentase menurunnya aparatur sipil negara dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi	15%
	1.3. Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	1.3.1 Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	10%
	1.4. Meningkatkan tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	1.4.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	240 orang
	1.5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	1.5.1 Presentase Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraannya	75%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
2.	2.1. Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi	2.1.1. Presentase penyelesaian pelayanan adminitrasi aparatur sipil negara	80%

	2.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Modren berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang prima ,efesien dan efektif	2.2.1. Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi untuk menignkatkan pelayanan manajemen aparatur sipil negara	48%
--	--	---	-----

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Realisasi capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2014. Hasil pengukuran capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014
BKP2D Provinsi Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	1.1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)	1.1.1. Presentase aparatur sipil negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi	7%	6%
	1.2. Peningkatan disiplin aparatur negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik	1.2.1. Presentase menurunnya aparatur sipil negara dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi	15%	1%
	1.3. Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	1.3.1. Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	10%	6%
	1.4. Meningkatkan tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	1.4.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	240 orang	209 orang
	1.5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	1.5.1. Presentase Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraannya	75%	14%

2.	2.1.Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi	2.1.1. Presentase penyelesaian pelayanan adminitrasi aparatur sipil negara	80%	48%
	2.2.Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Modren berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang prima ,efisien dan efektif	2.2.1. Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi untuk menignkatkan pelayanan manajemen aparatur sipil negara	48%	63%

Berikut ini diuraikan dari tabel diatas terhadap keberhasilan realisasi capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2014:

1. **Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi.** Maksud dari sasaran indikator ini adalah untuk meningkatkan SDM Aparatur Sipil Negara dalam pengembangan karier aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan, dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran yang bersertifkasi. Target capaian kinerja tahun 2014 7%, dengan realisasi capaian target sebesar 6%. Pada indikator target capaian kinerja belum dapat terlaksana secara optimal ini disebabkan adanya rasionalisasi kegiatan diklat dan menyebabkan beberapa diklat teknis tidak dapat diselenggarakan, sehingga BKP2D Provinsi Riau tidak bisa mengirimkan peserta untuk megikuti pelaksanaan diklat-diklat teknis;
2. **Presentase menurunnya Aparatur Sipil Negara dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi.** Sasaran indikator ini ditujukan untuk penegakan peraturan disiplin Aparatur sipil Negara, kode etik dan perilaku aparatur sipil negara dan kode etik profesi;. Dengan capaian target 15% dengan realisasi capaian target sebesar 1%. Dalam pelaksanaan realisasi capaian indikator ini terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap target capaian yang telah ditetapkan;
3. **Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan.** Sasaran

indikator ini ditujukan untuk peningkatan wawasan Aparatur Sipil Negara melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan Aparatur Sipil Negara dalam sistem pemerintahan. Target capaian 10% dan realisasi capaian target sebesar 6%. Dalam melaksanakan indikator ini belum dapat dilaksanakan secara optimal hal ini disebabkan adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena terkendala aturan dan regulasi yang berkenaan dengan E-Government;

4. **Jumlah Aparatur Sipil Negara yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan.** Sasaran Indikator ini bertujuan untuk terwujudnya Peningkatan fasilitas tugas belajar dan memberikan kemudahan bagi PNS yang akan meningkatkan pengetahuan dan keahliannya melalui tugas belajar mandiri, ijin belajar, beasiswa serta peningkatan dalam pelatihan kepemimpinan dengan menerapkan konsep pelatihan kepemimpinan pola baru. Dengan target capaian 240 orang realisasi capaian sebanyak 209 orang. Pada indikator ini belum bisa dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan waktu pelaksanaan diklat yang tidak mencukupi terbatasnya tenaga pengajar/widyaiswara dan terbatasnya sarana prasarana;
5. **Presentase Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraannya.** Tujuan sasaran indikator ini adalah Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dengan target capaian 75% dan realisasi capaian target 14%. Pada indikator ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang menunggu proses penetapan APBD perubahan tahun 2014 sehingga waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan;
6. **Presentase penyelesaian pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara.** Sasaran indikator ini ditujukan demi terwujudnya Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi. Dengan rencana target capaian 80% dan realisasi capaian target sebesar 48%. Pada indikator ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang menunggu proses penetapan APBD perubahan tahun 2014 sehingga waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan;

7. **Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi untuk meningkatkan pelayanan manajemen aparatur sipil negara.** Tujuan dari sasaran indikator ini adalah Peningkatan sarana dan prasarana kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima agar efisien dan efektif. Dengan capaian target 48% dan realisasi capaian target 63%. Pada indikator ini target capaian sudah dapat terlaksana dengan baik.

B. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi Keuangan BKP2D Provinsi Riau Tahun 2014

No.	Uraian	Pagu	Realisasi sd. 31 Desember 2014	Persentase (%)
1	Belanja Tidak Langsung	Rp.18,461,429,054.32	Rp.15,803,859,177.00	85.60%
2	Belanja Langsung	Rp.30,983,884,30.00	Rp.18,299,447,969.00	77.18%
	TOTAL	Rp.49,445,313,354.32	Rp.34,103,307,177.00	81.39%

Adapun rincian dari belanja langsung dapat dilihat dari perprogram sebagai berikut :

Realisasi Keuangan Belanja Langsung BKP2D Provinsi Riau Tahun 2014

No	Program	Pagu	Realisasi sd. 31 Desember 2014	Persentase (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 7,478,458,700.00	Rp. 4,043,235,852.00	78.88%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2,821,321,600.00	Rp. 1,800,058,200.00	83.05%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 836,065,000.00	Rp. 601,884,350.00	80.00%
4	Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Rp. 3,882,865,550.00	Rp. 2,383,035,930.00	87.59%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 683,891,525.00	Rp. 518,134,765.00	100%
6	Program Fasilitas Pindah /Purna Tugas PNS	Rp. 1.056,168,275.00	Rp. 314,871,896.00	75.48%
7	Program Pendidikan Kedinasan	Rp. 1,469,133,000.00	Rp. 434,930,150.00	32.56%

8	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp.12,755,980,650.00	Rp. 8,203,296,826.00	79.86%
	TOTAL	Rp. 30,983,884,30.00	Rp. 18,299,447,969.00	81.39%

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja instansi berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2014 pada umumnya telah dapat dilaksanakan. Program kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen terkait. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

SARAN DAN REKOMENDASI

1. Diperlukan Komitmen dan dukungan dari semua pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat menjalankan system pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan aparatur dan masyarakat;
2. Diperlukan koordinasi dari berbagai bidang yang ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau maupun dengan instansi lain yang terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan demi pencapaian target yang lebih optimal dimasa yang akan datang;
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran pada tahun berjalan, dimana percepatan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan pada tahun anggaran;
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal

sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, untuk itu diperlukannya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara efektif dan efisien;

5. Diperlukannya terobosan baru agar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyusunan rencana strategis, penetapan indikator, program, kegiatan, dan anggaran dengan mencerminkan kebutuhan organisasi;
6. Agar implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah benar-benar efektif, perlu direalisasikannya sinergitas antara laporan akuntabilitas kinerja dan laporan akuntabilitas keuangan sebagai satu kesatuan sehingga hasil dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel;
7. Menjadikan LAKIP ini sebagai gambaran ukuran kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang nyata dan akuntabel pada tahun berjalan.